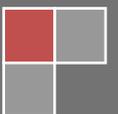


**TAHUN  
2022**

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR**



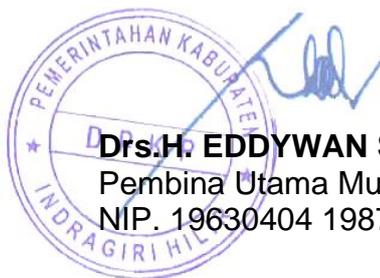
## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji serta Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Hidayahnya, kami telah menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Rencana Kerja Perubahan disusun dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2022, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022 ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dengan harapan semua rencana dapat terpenuhi sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberi petunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir.

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



**Drs. H. EDDYWAN SHASBY, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630404 198702 1 004

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN</b> .....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan .....	8
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	18
3.1. Telaahan Kebijakan Nasional .....	18
3.2. Tujuan Dan Sasaran RENJA Perubahan SKPD .....	18
3.3. Program Dan Kegiatan .....	20
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	23

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II

Tabel 3.1 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

# BAB I

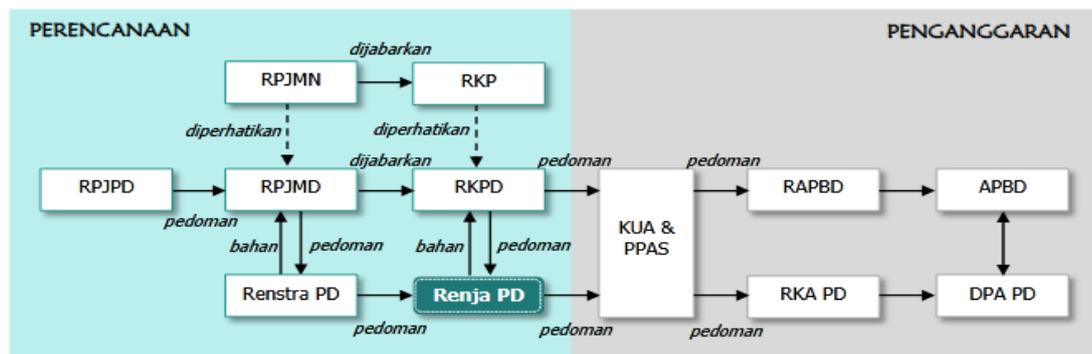
## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2022, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Gambar 1.1  
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (Satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah yang disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih, dimana program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kepentingan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan Salah satu OPD Kabupaten Indragiri Hilir memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya pelayanan kebakaran dan penyelamatan. Sebagai Institusi pemberi pelayanan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, perlu menetapkan Rencana Kerja yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pertahun, dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau timbul sehingga dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan pelayanan di masa depan.

Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022, adalah dokumen perencanaan sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan. Dengan demikian Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mensinergikan perencanaan pembangunan melalui program-program yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022 disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419).
- l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.
- k. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023
- l. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022 difungsikan sebagai dokumen resmi bagi Pemerintah daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan , dalam merencanakan program dan kegiatan tahun 2022.

#### **b. Tujuan**

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan bidang Ketentraman dan Ketertiban khususnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan bidang Ketentraman dan khususnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan saat ini, sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Rencana Kerja(Renja) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja-PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan dan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja Tujuan, serta Sistematika Penulisan dan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja).

#### **BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya, Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai**

triwulan II dan capaian Renstra SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Berisi mengenai Program dan Kegiatan yang disertai dengan kebutuhan pendanaannya

BAB IV Penutup

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD**

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perubahan tahun tahun 2022 triwulan II adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan / permasalahan yang dihadapi.

a. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi dan memenuhi target target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

##### 1) Program Pelayanan administrasi Perkantoran

Realisasi 2022 triwulan II sebesar 40,94 %, dengan target kinerja 100% . Pada program ini terdapat 5 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan. Capaian Kinerja Triwulan II Telah sesuai dengan Target Kinerja Tahu 2022

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 1 Sub Kegiatan, angka capaian telah telah sesuai dengan target realisasi Triwulan II
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan telah mencapai sesuai dengan target realisasi Triwulan II
- Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, terealisasi samapai triwulan II sebesar 19, hal ini dikarenakan adanya beberapa pengadaan peralatan kantor yang masih dalam proses pengadaan dan proses perubahan volume kegiatan pada anggaran perubahan, sub kegiatan terealisasi sesuai dengan target kinerja pada triwulan II. Untuk 6 sub kegiatan realisasi sesuai dengan target realisasi sampai dengan triwulan II
- Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari 3 sub kegiatan , rata –rata telah mencapai target kinerja triwulan II

- Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, terdiri dari 3 sub, rata-rata realisasi telah mencapai target kinerja triwulan II

## 2) Program Penanggulangan Bencana

Realisasi 2022 triwulan II sebesar 77 %, dengan target kinerja 100%. Pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 2 Sub Kegiatan. Capaian Kinerja Triwulan II Telah sesuai dengan Target Kinerja Tahu 2022.

- Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan sub kegiatan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota , terealisasi sampai triwulan II 80 %, terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan pada triwulan II. Sub Kegiatan Pengendalian Sub Kegiatan resiko bencana Kabupaten Kota terealisasi 50 % tercapai sesuai dengan target triwulan II.

## 3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Realisasi 2022 triwulan II sebesar 66 %, dengan target kinerja 100% . Pada program ini terdapat 3 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan. Capaian Kinerja Triwulan II Telah sesuai dengan Target Kinerja Tahun 2022

- Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran, terealisasi sampai triwulan II sebesar 86,66 % dan telah sesuai dengan target capaian triwulan II.
- Kegiatan Inspeksi peralatan proteksi kebakaran dengan sub kegiatan pendataan sarana proteksi kebakaran, terealisasi sampai triwulan II sebesar 56 % , . Tercapai sesuai dengan target triwulan II
- Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran dengan Sub Kegiatan Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran terealisasi sampai triwulan II sebesar 100 % dan telah sesuai dengan target capaian triwulan II

- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Implikasi yang timbul terhadap Target dan Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Dikarenakan terdapat beberapa program kegiatan yang hingga awal tahun 2021 tidak didukung oleh tersedianya anggaran yang memadai dan terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikas, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodevikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang kemudian disesuaikan kembali Program Kegiatan tersebut sesuai dengan Peraturan. Maka terjadi Perubahan Indikator kinerja dan target capaian program kegiatan Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan Kondisi yang ada.
- c. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/ kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut:
- Penyesuaian target capaian pada Tahun Anggaran 2022.
  - Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan.
  - Efisiensi alokasi belanja sesuai dengan kebutuhan
  - Memprioritaskan anggaran pada pencapaian target SPM

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN /KOTA  
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2022**

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				5	6	7	8	9	12		13 = 6 + 12		14=13/5 X 100 %							
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
1	Meningkatnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	100	5.324,52	100	6.079,97	100	6.291,68	17,22	1.086,64	23,72	1.492,90	40,94	2.579,54	140,94	8.659,51	1,41	1,42	Sekretariat
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	rata rata aspek nilai aspek perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	100	88,4	100	313,10	100	85,40	100	9,70	100	19,15	100	28,85	200	341,95	2	1,09	Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	-	-	5	19,20	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19,20	1	1,00	Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	6	88,4	6	293,90	6	85,40	6	85,40	2	19,15	5	28,85	11	322,75	1,83	1,10	Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi dan sarana dan prasarana aparatur perkantoran	100	4.267,74	100	3.964,08	100	4.331,64	19,07	825,86	28,46	1.232,87	47,53	2.058,73	147,53	6.022,81	1,48	1,52	Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan tunjangan ASN	47	4.267,74	47	3.964,08	47	4.331,64	47	825,86	47	1.232,87	47	2.058,73	94	6.022,81	2	1,52	Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur Yang bekinerja Baik	100	20,00	688	562,38	-	-	-	-	-	-	-	-	688	562,38	1	1,00	Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang disediakan	-	-	688	550,50	-	-	-	-	-	-	-	-	688	550,50	1	1,00	Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
	2.Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu yang disediakan	-	-	360	11,88	-	-	-	-	-	-	-	-	360	11,88	1	1,00	Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	40	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	100	287,76	3	452,75	100	1.316,97	5,72	130,99	8	101,13	13,72	232,12	16,72	684,87	5,57	1,51	Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Listrik dan Penerangan yang disediakan	15	8,00	12	4,50	15	2,40	8	1,46	7	0,95	15	2,4	27	6,90	2,25	1,53	Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	10	30,00	23	29,99	68	215,12	8	10,86	5	4,52	13	15,38	36	45,37	1,57	1,51	Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik yang disediakan	2	115,00	3913	178,17	2	89,76	2	27,46	2	31,55	2	59,01	3915	237,18	1,00	1,33	Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
		Jumlah makanan dan minuman yang disediakan			3663	78,25	-	-	-	-	-	-	-		3663	78,25	1	1,00	Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	15	15,00	5	20,38	5	15,00	2	5,10	2	6,29	2	11,36	7	31,74	1,4	1,56	Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	4	5,00	1080	3,30	1080	803,55	270	0,20	355	0,70	625	0,9	1705	4,20	1,58	1,27	Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	63	113,76	50	45,48	63	191,14	27	85,92	18	57,12	45	143,04	95	188,52	1,9	4,15	Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	-	-	52	123,07	-	-	-	-	-	-	-		52	123,07	1	1,00	Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100	50,00	2	172,27	-	-	-	-	-	-		2	172,27	1	1,00	1,00	Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1	20,00	2	45,65	-	-	-	-	-	-	-	-	2	45,65	1	1,00	Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan	
Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	10,00	1	126,62	-	-	-	-	-	-	-	-	1	126,62	1	1,00	Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan	
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan	
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan ketersediaan administrasi sarana dan prasarana aparatur perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>459,63</b>	<b>100</b>	<b>336,13</b>	<b>100</b>	<b>Perse</b>	<b>426,65</b>	<b>21</b>	<b>91,21</b>	<b>21</b>	<b>90,30</b>	<b>42</b>	<b>181,51</b>	<b>142</b>	<b>517,64</b>	<b>1,42</b>	<b>1,54</b>	Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Ketersediaan Kebutuhan surat menyurat	10	4,00	439	2,49	100	2,00	50	1,00	50	1,00	100	2	539	4,49	1,23	1,80	Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	3	80,00	2	44,28	4	74,00	4	17,13	4	16,43	4	33,56	6	77,84	3	1,76	Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelaksana yang dibayarkan	19	375,63	10	289,55	76	350,00	76	73,07	76	72,87	76	145,94	86	435,49	8,6	1,50	Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan	
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan ketersediaan administrasi sarana dan prasarana aparatur perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>151,99</b>	<b>100</b>	<b>279,00</b>	<b>100</b>	<b>131,00</b>	<b>20</b>	<b>28,87</b>	<b>38</b>	<b>49,41</b>	<b>58</b>	<b>78,28</b>	<b>158</b>	<b>357,28</b>	<b>1,58</b>	<b>1,28</b>	<b>Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	

			Jumlah kendaraan dinas jabatan / Oprasional / Lapangan yang dipelihara			15	14,80							15	14,80	1	1,00	Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/ operasional/ Lapangan yang dipelihara	25	36,99	31	227,82	15	96,00	4	25,77	3	18,68	7	44,45	38	272,27	1,23	1,20	Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30	100,00	15	14,93	7	5,00	4	3,10	1	0,73	5	3,83	20	18,76	1,33	1,26	Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	15,00	1	10,00	1	30,00	0	0,00	1	30,00	1	30	2	40,00	2	4,00	Subbagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	Persentase Warga Negara yang Memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	100	2226,00	100	3.321,48	100	4.407,00	8	380,69	69	2.895,57	77	3.278,26	177	6.599,74	1,77	1,99	Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang tertangani	100	1659,97	11	3.227,98	100	4.407,00	8	380,69	69	2.895,57	77	3.278,26	88	6.506,24	8	2,02	Seksi Sarana dan Prasarana
		Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana kebakaran dan Penyelamatan yang disediakan	5	354,41	3	1.664,81	5	3.084,18	2	102,68	2	2.612,42	4	2.715,10	7	4.379,91	2,33	2,63	Seksi Sarana dan Prasarana

		Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang bersertifikat sebagai Pengelola Penanganan Kebakaran	100	1305,56	11	1.613,17	3	1.322,81	3	270,00	3	283,15	6	553,15	11	2.166,32	1	1,34	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang berhasil terlaksana	100	350,00	-	-	-	-											-
		Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kebakaran yang ditangani	150	350,00	-	-	-	-											-
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah mitra kelembagaan penanganan kebakaran yang dibentuk di kecamatan dan hari jadi damkar	100	250,00	100	43,49	-	-							100	43,49	1	1,00	-
		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Peringatan Hari Pemadam kebakaran	20	250,00	1	43,49	-	-							1	43,49	1	1,00	-
3	Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan Non Kebakaran	100	75,00	100	218,91	100	148,00	36	93,78	30	72,34	66	166,12	166	385,03	1,66	1,76	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran

	<b>Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Efektivitas pencegahan, Pengendalian Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun</b>	100	25,00	58	147,41	100	34,95	55	65,90	38	47,38	93	113,28	151	260,69	2,60	1,77	<b>Seksi Evakuasi dan Penyelamatan</b>
	Sub Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran			100	49,67	-	-							100	49,67	1	1,00	-
	Sub Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran			0	0,00	-	-							0	0,00			-
	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	sarana dan prasarana Evakuasi dan Penanganan Korban yang dilakukan	40	10,00	1	97,74	15	34,95	8	65,90	5	47,38	13	113,28	14	211,02	14	2,16	<b>Seksi evakuasi dan Penyelamatan</b>
	Sub Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Oprasional pencegahan bahaya kebakaran yang direhabilitasi			0	0,00	-	-	-	-	-	-			0	0,00			-
	<b>Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>Terlaksanakannya Inspeksi dan Proteksi Kebakaran</b>	<b>100</b>	<b>15,00</b>	<b>271</b>	<b>39,01</b>	<b>100</b>	<b>64,47</b>	<b>9,3</b>	<b>8,66</b>	<b>46</b>	<b>10,96</b>	<b>55,3</b>	<b>19,62</b>	<b>326,3</b>	<b>58,63</b>	<b>1,20</b>	<b>1,50</b>	<b>Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran</b>
	Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Peralatan Proteksi kebakaran yang di data	450	10,00	6393	39,01	450	64,47	42	8,66	210	10,96	252	19,62	6645	58,63	1,04	1,50	<b>Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran</b>

	Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang disyaratkan harus memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	10	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	<b>Kejadian kebakaran yang terinvestigasi</b>	<b>100</b>	<b>20,00</b>	<b>9</b>	<b>32,47</b>	<b>100</b>	<b>48,57</b>	<b>40</b>	<b>19,21</b>	<b>20</b>	<b>13,99</b>	<b>60</b>	<b>33,2</b>	<b>69</b>	<b>65,67</b>	<b>7,67</b>	<b>2,02</b>	<b>Operasi Pemadaman dan Investigasi Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran</b>
	Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Kejadian Kebakaran yang diinvestigasi	15	20,00	12	32,47	8	48,57	4	19,21	2	13,99	6	33,2	18	65,67	1,5	2,02	Operasi Pemadaman dan Investigasi Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Persentase partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran</b>	<b>100</b>	<b>15,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>											<b>Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan</b>
	Sub Kegiatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya	100	15,00	-	-	-	-											Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Program prioritas disajikan berdasarkan bidang urusan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Identifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh urusan wajib dan pilihan telah diprioritaskan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum khususnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan disajikan pada tabel 3.1

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel 3.1

Program Kegiatan dan Sub kegiatan Perubahan Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPMD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPMD Tahun 2021	Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								10.747.934.520	11.239.156.446	Kab. Inhil	DAU						
1.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	100 Porsen		100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	-	6.291.680.720	6.320.979.646	Kab. Inhil	DAU				100 Porsen	6.653.431.604	Sekretariat
1.05.01.2.0	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata rata aspek nilai aspek perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	100 Porsen		100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	-	85.400.000	85.400.000	Kab. Inhil	DAU				100 Porsen	88.400.000	Sub Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1.05.01.2.0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun	6 Dokumen		6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	-	85.400.000	85.400.000	Kab. Inhil	DAU			Dokumen Laporan	6 Dokumen	88.400.000	Sub Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1.05.01.2.0	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan Administrasi dan sarana dan prasarana aparat perkantoran	100 Porsen		100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	-	4.331.644.920	4.843.866.846	Kab. Inhil	DAU				100 Porsen	4.665.097.558	Sub Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1.05.01.2.0	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan tunjangan	49 Orang		1 Tahun	47 Orang	47 Orang	-	4.331.644.920	4.843.866.846	Kab. Inhil	DAU			Aparatur Sipil Negara	49 Orang	4.665.097.558	Sub Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1.05.01.2.0	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana aparat perkantoran	100 Porsen		100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	-	1.316.976.600	883.936.400	Kab. Inhil	DAU				100 Porsen	781.798.700	Sub Umum, kepegawaian dan Perengkapam
1.05.01.2.0	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Listrik dan Penerangan yang disediakan	15 Jenis		12 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	-	2.400.000	4.400.000	Kab. Inhil	DAU			Administrasi Umum	15 Jenis	12.409.300	Sub Umum, kepegawaian dan Perengkapam
1.05.01.2.0	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	10 Jenis		23 Jenis	68 Jenis	68 Jenis	-	215.121.550	216.846.600	Kab. Inhil	DAU			Administrasi Umum	10 Jenis	137.873.400	Sub Umum, kepegawaian dan Perengkapam
1.05.01.2.0	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik yang disediakan	2 Jenis		3913 Liter, 800 Kali	2 Jenis	2 Jenis	-	89.760.250	101.785.000	Kab. Inhil	DAU			Administrasi Umum	2 Jenis	139.945.000	Sub Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1.05.01.2.0	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	15 Paket		5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	-	15.000.000	36.260.000	Kab. Inhil	DAU			Administrasi Umum	15 Paket	40.000.000	Sub Umum, kepegawaian dan Perengkapam
1.05.01.2.0	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	3 Dokumen		1080 Eksemplar	1080 Eksemplar	1080 Eksemplar	-	803.550.000	251.250.000	Kab. Inhil	DAU			Administrasi Umum	3 Dokumen	2.760.000	Sub Umum, kepegawaian dan Perengkapam
1.05.01.2.0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	146 Kali		92 Kali, 92 Kali	63 Kali	63 Kali	-	191.144.800	273.394.800	Kab. Inhil	DAU			Administrasi Umum	146 Kali	448.811.000	Sub Umum, kepegawaian dan Perengkapam
1.05.01.2.0	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi sarana dan prasarana aparat perkantoran	100 Porsen		100 Porsen	100 porsen	100 porsen	-	426.659.200	382.976.400	Kab. Inhil	DAU				100 Porsen	591.743.600	Sub Umum, kepegawaian dan Perengkapam
1.05.01.2.0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Ketersediaan Kebutuhan surat menyurat	70 Laporan		550 Lembar	100 Porsen	100 Porsen	-	2.000.000	3.000.000	Kab. Inhil	DAU			Administrasi Umum Kantor	70 Laporan	5.000.000	Sub Umum, kepegawaian dan Perengkapam
1.05.01.2.0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	3 Laporan		2 Rekening	4 Rekening	4 Rekening	-	74.400.000	64.167.200	Kab. Inhil	DAU			Administrasi Umum Kantor	3 Laporan	90.600.000	Sub Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1.05.01.2.0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelaksana yang dibayarkan	19 Laporan		12 Ruang 10 Orang	76 Orang	76 Orang	-	350.259.200	315.809.200	Kab. Inhil	DAU			Administrasi Umum Kantor	19 Laporan	496.143.600	Sub Umum, kepegawaian dan Perengkapam
1.05.01.2.0	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi sarana dan prasarana aparat perkantoran	100 Porsen		100 Porsen	100 Porsen	100 Porsen	-	131.000.000	124.800.000	Kab. Inhil	DAU				100 Porsen	421.683.746	Sub Umum, kepegawaian dan Perengkapam
1.05.01.2.0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/ operasional/ Lapangan yang dipelihara	40 Unit		31 Unit 25 Unit	15 Unit	15 Unit	-	96.000.000	84.800.000	Kab. Inhil	DAU			Sarana dan Prasarana	40 Unit	180.720.000	Sub Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1.05.01.2.0	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	40 Unit		15 Unit	7 Unit	7 Unit	-	5.000.000	10.000.000	Kab. Inhil	DAU			Sarana dan Prasarana	40 Unit	15.063.746	Sub Umum, kepegawaian dan Perengkapam
1.05.01.2.0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit		46 Ruang	1 Unit	1 Unit	-	30.000.000	30.000.000	Kab. Inhil	DAU			Sarana dan Prasarana	1 Unit	225.900.000	Sub Umum, kepegawaian dan Perengkapam

1.05.03.	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	Persentase Warga Negara yang Memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	-	4.218.378.000	4.598.276.000	Kab. Inhil	DAU			100 Persen	3.988.361.900	Bidang Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran
1.05.03.2.0 2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang tertangani	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	-	4.218.378.000	4.598.276.000	Kab. Inhil	DAU			100 Persen	3.925.306.900	Seksi Sarana dan Prasarana
1.05.03.2.0 2.03	Sub Kegiatan/Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana kebakaran dan Penyelamatan yang disediakan	3 Dokumen 60 Jenis		1 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	-	3.084.181.000	3.468.641.000	Kab. Inhil	DAU		Kesiapsiagaan petugas dan sarana & Prasarana	3 Dokumen 60 Jenis	2.082.284.900	Seksi Sarana dan Prasarana
1.05.03.2.0 2.05	Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang bersertifikat sebagai Pengelola Penanganan Kebakaran	100 Persen		11 Jenis	3 Orang	3 Orang	-	1.134.197.000	1.129.635.000	Kab. Inhil	DAU		Kesiapsiagaan petugas dan sarana & Prasarana	100 Persen	1.843.022.000	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1.05.04	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Cakupan pelayanan bencana kebakaran dan Non Kebakaran	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	-	237.875.800	319.900.800	Kab. Inhil	DAU			100 Persen	753.329.250	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
1.05.04.2.0 1	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Efektifitas pencegahan, Pengendalian Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	-	124.829.800	174.829.800	Kab. Inhil	DAU			100 Persen	349.999.850	Seksi Evakuasi dan Penyelamatan
1.05.04.2.0 1.03	Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	sarana dan prasarana Evakuasi dan Penanganan Korban yang di lakukan	2 Dokumen 125 Kejadian		1 Unit	15 Jenis	15 Jenis	-	124.829.800	174.829.800	Kab. Inhil	DAU		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	2 Dokumen 125 Kejadian	349.999.850	Seksi Evakuasi dan Penyelamatan
1.05.04.2.0 2	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksanakannya Inspeksi dan Proteksi Kebakaran	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	-	64.470.000	77.865.000	Kab. Inhil	DAU			100 Persen	94.828.800	Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran
1.05.04.2.0 2.01	Sub Kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Peralatan Proteksi kebakaran yang di data	550 Unit		6393 Unit	450 Unit	450 Unit	-	64.470.000	77.865.000	Kab. Inhil	DAU		Peralatan Proteksi Kebakaran	550 Unit	94.828.800	Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran
1.05.04.2.0 3	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Kejadian kebakaran yang terinvestigasi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen	-	48.576.000	67206.000	Kab. Inhil	DAU			100 Persen	250.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan
1.05.04.2.0 3.01	Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Kejadian Kebakaran yang diinvestigasi	15 Dokumen		12 Bulan	6 Kejadian	6 Kejadian	-	48.576.000	67206.000	Kab. Inhil	DAU		Kejadian Kebakaran	15 Dokumen	250.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan

Berdasarkan tabel 3.1, dapat diuraikan bahwa RKPD Perubahan tahun 2022 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari 3 program, 9 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut telah sesuai dengan rancangan perubahan RKPD 2022, namun pada anggaran ada penambahan dan pengurangan serta pergeseran. Pagu anggaran murni Rp.10.747.934.520,00,- pagu perubahan Rp.11.239.156.446,00. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 29.298.926,00 (0,99%) , Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp.379.898.000,00 (0,91%), Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp. 82.025.000,00 (0,74%).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja ) Perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2022, adalah dokumen perencanaan sebagai arah dan acuan dari seluruh komponen Program dan Kegiatan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai Visi, Misi dan arah kebijakan pembagunan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat, dengan demikian Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mesinergikan perencanaan Pembangunan Daerah melalui Program, Kegiatan dan sub Kegitan yang merupakan satu kesatuan dari rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir.

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan perencanaan yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh seksi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Keberadaan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan salah satu cara dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Program-program yang disusun merupakan penjabaran atas kebijakaan yang telah ditentukan, yang kemudian disesuaikan dengan pembagian program tanpa mengesampingkan kebijakan Internal dalam upaya peningkatan penanggulangan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diharapkan dapat dievaluasi dan diukur berdasarkan kinerja pencapaian sasaran, program dan kegiatan pada periode tertentu secara berkala pada setiap tahunnya melalui akuntabilitas Kinerja.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir terus berupaya mengatasi segala kendala dan permasalahan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, baik kendala teknis maupun anggaran. Beberapa kendala teknis yang dihadapi dilapangan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

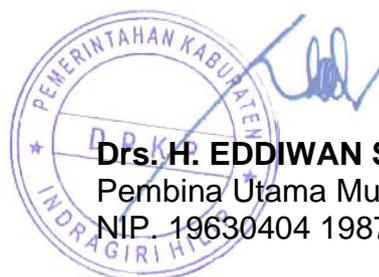
Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada renja perubahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2022 antara lain:

- Penyusunan Renja Dinas Pemadam Kebakaran Berpedoman pada Renstra

- Penyusunan Renja disesuaikan dengan pencapaian target SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- b. Kaedah Pelaksanaan
- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir berkewajiban untuk melaksanakan Program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Tahun 2022 dengan efektif dan efisien.
  - Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2022 sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2022, dan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran
  - Menjaga konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- c. Rencana Tindak Lanjut
- Adapun rencana tindak lanjut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah :
- berkomitmen untuk melaksanakan Program dan Kegiatan mengacu pada dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2022 yang telah ditetapkan
  - meningkatkan kinerja pelayanan Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai target standar pelayanan minimal (SPM).

Semoga Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 ini senantiasa bisa memberikan gambaran kebutuhan nyata terhadap pemberian pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan kepada masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



**Drs. H. EDDIWAN SHASBY, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630404 198702 1 004